SALINAN

PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. LETJEN R. SUPRAPTO No. 109

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd

PERKARA PERDATA
GUGATAN

Penggugat:
Beni Susanto

melawan

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Grobogan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin karya (Berkarya)

Turut Tergugat :
1.Mashadi Muryanto
2.Bupati Grobogan
3.Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
4.Gubernur Jawa Tengah

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Beni Susanto, bertempat tinggal di Desa Sumberjatipohon Rt 02/ Rw 01 Kecamatan Grobogan Kabupaten Purwodadi, Sumberjatipohon, Grobogan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wardoyo Nomor 932 A Rt 001 Rw 006 Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022,

Sebagai .....**Penggugat**

Lawan

1. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Grobogan**, tempat kedudukan Desa Plosorejo Rt 02/ Rw 01 Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Plosorejo, Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dady Hartadi Rohmaludin,SH.MHKetua Dewan Pimpinan Pusat Parta Berkarya juga Advokat / Pengacara dan atau Penasihat Hukum pada Pimpinan Pusat (DPP Partai Berkarya) Beralamat Jl. Taman Margasatwa Raya No.11 RT. 01 RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

   Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 3 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 241 / SK. Khusus / 2022 / PN Pwd tanggal 5 Desember 2022,

   Sebagai ..... **Tergugat I**

Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (berkarya), tempat kedudukan Jalan Taman Margasatwa Raya No 11 Jakarta Selatan 12540, Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dady Hartadi Rohmaludin,SH.MHKetua Dewan Pimpinan Pusat Parta Berkarya juga Advokat / Pengacara dan atau Penasihat Hukum pada Pimpinan Pusat (DPP Partai Berkarya) Beralamat Jl. Taman

Margasatwa Raya No.11 RT. 01 RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 3 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 242 / SK. Khusus / 2022 / PN Pwd tanggal 5 Desember 2022 ;

Sebagai .....**Tergugat II;**

Mashadi Muryanto, bertempat tinggal di Dusun Plosorejo Rt 02/ Rw 01 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, Plosorejo, Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dady Hartadi Rohmaludin,SH.MHKetua Dewan Pimpinan Pusat Parta Berkarya juga Advokat / Pengacara dan atau Penasihat Hukum pada Pimpinan Pusat (DPP Partai Berkarya) Beralamat Jl. Taman Margasatwa Raya No.11 RT. 01 RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 3 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 242 / SK. Khusus / 2022 / PN Pwd tanggal 5 Desember 2022 ;

Sebagai .....**Turut Tergugat I**

Bupati Grobogan, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No. 6 Brambangan Purwodadi Grobogan, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIK SETYO WAHYUDI,SH.MH Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ((Sub Koordinator Bantuan Hukum) Beralamat Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi – Grobogan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 3 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 261 / SK. Khusus / 2022 / PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 ;

sebagai .....**Turut Tergugat II**

Ketua Dprd Kabupaten Grobogan, tempat kedudukan Jalan Bhayangkara No. 3 Purwodadi Grobogan, Purwodadi, Purwodadi,

Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO,SH Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Beralamat Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi – Grobogan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 6 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 262 / SK. Khusus / 2022 / PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 ;

Sebagai ..... **Turut Tergugat III**

Gubernur Jawa Tengah, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 9 Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADIGANA PRANINDITO,SH.MH Analisis Hukum Ahli Muda Pada SETDA Propinsi Jawa Tengah Beralamat Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 26 Desember 2022 dan telah terdaftar di buku Regester Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 2 / SK. Khusus / 2023 / PN Pwd tanggal 2 Januari 2023 ;

Sebagai .....**Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) di DPD Kabupaten Grobogan dengan Nomor Kartu Tanda Anggota Nomor; 3315 1218 1000 0008 .
2. Bahwa pada awal pendirian penggugat selain sebagai Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) pada tahun 2019 juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan sehingga pada saat itu penggugat membiayai kegiatan kegiatan pembentukan kepengurusan, merintis, mencari pengurus serta mencari anggota, simpatisan di partai

tersebut dari awal sampai dengan proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum dan lolos menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Purwodadi Grobogan.

3. Bahwa pada pemilihan umum tahun 2019 penggugat mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan di daerah pemilihan (Dapil II) meliputi Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan dengan modal dan kemampuan sendiri tanpa dukungan modal apapun dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Grobogan maupun Dewan Pimpinan Pusat.
4. Bahwa pada pemilihan umum tahun 2019 penggugat mendapatkan suara sendiri lebih kurang 6.800 (enam ribu delapan ratus).
5. Bahwa atas perolehan suara pribadi penggugat dan ditambah suara caleg lainnya dari Partai Berkarya pada daerah pemilihan 2 (dua) tersebut maka penggugat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Bahwa dengan mendasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ; 170/53 TAHUN 2019 Tentang Peresmian Pemberhantian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Kenggotaan 2019 – 2024 , pengggugat diangkat menjadi anggota DPRD Grobogan dengan masa keanggotaan tahun 2019 – 2024.
7. Bahwa setelah proses pemilihan umum tersebut selesai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdapat dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat yaitu DPP dengan ketua umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin Andi Picunang dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat lainnya, yang mana puncak perselisihan tersebut yaitu dengan adanya sengketa kepengurusan sebagaimana dalam putusan dalam perkara dengan Nomor : 182/G/2020/PTUN Jkt tanggal 16 Februari 2021 , Juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor ; 115/B/2021/PT TUN JKT tanggal 1 September 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119.K.TUN/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya putusan akhir dari perselisihan dualisme tersebut pihak tergugat II lah yang dinyatakan sah sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) tersebut.
8. Bahwa dualisme kepengurusan di pusat sebagaimana tersebut diatas menyebabkan perpecahan dan terdapat dualism kepengurusan pula di tingkat propinsi dan kabupaten sehingga menimbulkan kekisruhan serta kebingungan ditingkat bawah sehingga membingungkan dalam berkoordinasi

dan komunikasi , bahkan termasuk kepengurusan ditingkat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan yang sebelumnya di ketuai oleh penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa proeses sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan diganti serta Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan dipimpin tergugat I yang mana terhadap perbuatan tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah mendapatkan surat keputusan tentang pencabutan Kartu tanda anggota partai beringin karya sebagaimana dimaksut dalam surat permintaan penggantian antar waktu dan pemberitahuan / pencabutan kartu tanda anggota maka dengan demikian kartu tanda anggota partai beringin karya atasnama penggugat dengan nomor : 3315 1218 1000 0008 adalah sah secara hukum.

10. Bahwa turut tergugat I yaitu Mashadi Muryanto dalam hal in telah di usulkan untuk dimohon dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai anggota antar waktu Bahwa penggugat menjadi anggota dewan di kabupaten Grobogan telah dijalaninya sebagaimana mestinya namun tahu – tahu tanpa alasan dan sebabnya penggugat sekitar awal bulan November 2022 menerimat surat dari turut tergugat III yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pemberhentian/Pencabutan KTA A.n Beni Susanto ST Anggota DPRD Grobogan dengan tanggal surat 31 Oktober 2022 dengan lampiran surat dar tergugat II berupa surat Nomor ; 064/B/DPP/BERKARYA/X/2022 TANGGAL 7 Oktober 2022 Tentang Permohonan Pergantian Antar waktu (PAW) dan Pemberhentian / Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA).

11. Bahwa sampai dengan saat ini penggugat sebagai anggota partai berkarya dan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah grobogan sudah menjalaninya dengan sebaik baiknya namun tergugat II mengirim surat Nomor : 064/B/DPP/BERKARYA/X/2022 TANGGAL 7 Oktober 2022 Tentang Permohonan Pergantian Antar waktu (PAW) dan Pemberhentian / Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditujukan pada turut tergugat III , padahal penggugat tidak pernah mendapat sanksi partai apalagi surat keputusan yang dibuat tergugat II yang isinya mencabut KTA partai berkarya atasnama penggugat tersebut.

12. Bahwa pada tahun 2021 terdapat sengketa di Mahkamah Partai yang mana dalam perkara tersebut sebagai penggugat adalah Abdul Khalek Lubis dkk dan tergugatnya adalah Tergugat I ***Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono Jabatan Ketua Umum Partai Beringin Karya***

(BERKARYA) dan tergugat II adalah Dr. H Badaruddin Andi Picunang ST, MM, MT M.AP dan dengan register nomor : 003.MP/Pts-PIP/PBK/I/2021 yang mana amar putusan angka 6 (enam) meneyebutkan bahwa :

Memberhentikan secara tetap TERGUGAT II dari jabatannya sebegai Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (BERKARYA).

13. Bahwa dengan mendasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) maka kedudukan Sekretaris Jenderal yang bernama ***Dr. H Badaruddin Andi Picunang ST, MM, MT M.AP, pada saat ini bukanlah sebagai sekretaris jenderal*** sehingga berkaitan dengan segala surat yang dikeluarkan dengan sekretaris jenderal tersebut adalah melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.
14. Bahwa surat pergantian antar waktu dan pemberitahuan pemberhentian / pencabutan KTA A.n Beni Susanto ST Nomor ; 064/B/DPP/BERKARYA/X/2022 TANGGAL 7 Oktober 2022 dari tergugat II yang ditujukan pada turut tergugat III dan dilanjutkan proses PAW nya ke pada turut tergugat IV (Gubernur Jawa Tengah) melalui Turut Tergugat II (Bupati Grobogan) di keluarkan dan di tanda tangani oleh ***Dr. H Badaruddin Andi Picunang ST, MM, MT M.AP*** , sehingga dengan demikian melanggar putusan Mahkamah Partai Nomor 003.MP/Pts-PIP/PBK/I/2021 sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga
15. Bahwa penggugat sampai saat ini tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari tergugat I maupun tergugat II dan juga tidak pernah mendapatkan surat penghentian / pencabutan kartu tanda anggota partai dari tergugat I maupun tergugat II maka dengan demikian Kartu Tanda Anggota Partai berkarya atasnama Beni Susanto ST sampai saat ini adalah tetap berlaku dan berkekuatan hukum.
16. Bahwa turut tergugat I yaitu Mashadi Muryanto dengan Kartu Tanda Anggota Nomor ; 3315 0422 1000 4762 telah di usulkan untuk dimohon dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai anggota antar waktu namun dasar penggantian antar waktu mendasarkan surat yang dibuat secara melawan hukum maka turut tergugat I adalah pihak yang berkepentingan dan mohon dihukum untuk tunduk dan patuh isi dalam putusan perkara ini.
17. Bahwa turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV oleh karena sebagai pihak yang berkepentingan maka dengan ini mohon untuk dihukum tunduk dan patuh
18. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan – turut tergugat III telah menerima dan melanjutkan surat dari tergugat II

tentang Permohonan PAW dan Pemberitahuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Beringin Karya atasnama penggugat kepada turut tergugat IV (Gubernur Jawa Tengah) melalui turut tergugat II (Bupati Grobogan) maka dengan ini sudah sepatutnyalah apabila para turut tergugat menghentikan proses PAW tersebut sambil menunggu keputusan secara hukum dalam gugatan perkara ini.

19. Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat maka sudah sepatutnyalah apabila tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi secara materiil yang mana selama penggugat merintis mendirikan partai sampai dengan mencalonkan anggota dewan telah mengeluarkan biaya – biaya yang sangat besar yaitu sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka dengan dengan ini sepatutnyalah apabila tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar uang ganti rugi tersebut.

20. Bahwa oleh karena para turut tergugat berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknyalah apabila dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

Bahwa mendasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Grobogan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 064/B/DPP/BERKARYA/X/2022 TANGGAL 7 Oktober 2022 Tentang Permohonan Pergantian Antar waktu (PAW) dan Pemberhentian / Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) melawan hukum dan tidak berkekuatan Hukum
4. Menyatakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Beringin Karya (Berkarya) Penggugat No. 331512181000 0008 an Beni Susanto ST sah secara Hukum
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi pada Penggugat secara tunai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tunduk dan patuh isi putusan dalam perkara ini
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Aris Sudaryanto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi risalah panggilan nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd, tanggal 27 Februari 2023, nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd, tanggal 8 Maret 2023 dan nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd, tanggal 21 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil dengan sah tidak datang menghadap dipersidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

MemperhatikanPasal 124 HIR/148 RBgdan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;[1]

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.946.000.- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vabiannes S Wattimena,S.H dan Marolop Winner P Bakara, S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 43 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut SUWONDO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Tergugat serta tanpa di hadiri Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
tertanda	***tertanda***
VABIANNES S WATTIMENA, S.H	ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H.,M.H
tertanda	
MAROLOP WINNER P BAKARA, S.H	

Panitera Pengganti

tertanda

SUWONDO, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan dan pemberitahuan	: Rp.	2.746.000,-
- PNBP Panggilan dan pemberitahuan	: Rp.	100.000.-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Jumlah	: Rp.	2.946.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

- Bahwa Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 03 April 2023 tersebut telah **Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)** sejak tanggal 19 April 2023 karena Para Pihak dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan upaya hukum.
- Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada :
  1. Beni Susanto (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya Machasinrochman, S.H. pada tanggal 05 April 2023.
  2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Grobogan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) (Para Tergugat) pada tanggal 05 April 2023.
  3. Mashadi Muryanto (Turut Tergugat I) pada tanggal 05 April 2023.
  4. Bupati Grobogan (Turut Tergugat II) pada tanggal 03 April 2023.
  5. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan (Turut Tergugat III) pada tanggal 05 April 2023.
  6. Gubernur Jawa Tengah (Turut Tergugat IV) pada tanggal 03 April 2023.

Panitera,

ttd

SRI MARTONO, S.H.,M.H
NIP. 19661210 198703 1 0003

- Salinan yang sama bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **AGOES PRASETYO ADI PRAYOGO,SH (Kuasa Ketua DPRD Kabupaten Grobogan (Turut Tergugat III))** pada hari Selasa, 02 Mei 2023.

Pengadilan Negeri Purwodadi
Panitera,

SRI MARTONO, S.H.,M.H
NIP. 19661210 198703 1 0003

Rincian PNBP Kepaniteraan :

- Meterai	Rp.	10.000,00
- Leges	Rp.	10.000,00
- Penyerahan salinan penetapan	Rp.	7.000,00 +
Jumlah Biaya Salinan Penetapan	Rp.	27.000,00

(Dua Puluh Tujuh Ribu rupiah)